

1. **Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.** Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indeks inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2024 adalah sebagai berikut :

Juli	Agustus	September
2,44%	2,22%	1,52%

Pada Juli 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,44 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 3,32 persen dengan IHK sebesar 107,19 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 2,11 persen dengan IHK sebesar 106,50. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Juli 2024 mengalami deflasi sebesar 1,07 persen. Hingga Juli 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,76 persen. Pada Agustus 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 2,22 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,59. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 3,45 persen dengan IHK sebesar 107,21 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 1,98 persen dengan IHK sebesar 106,47. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Agustus 2024 mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Hingga Agustus 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,59 persen. Pada September 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,52 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,12. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 2,85 persen dengan IHK sebesar 107,00 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 1,28 persen dengan IHK sebesar 106,02. Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan September 2024 mengalami deflasi sebesar 0,44 persen. Hingga September 2024, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,15 persen

2. **Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.**

1. Provinsi Sumatera Barat kembali mencatatkan deflasi pada bulan September 2024, melanjutkan tren deflasi yang telah berlangsung selama tiga bulan berturut-turut. Peningkatan pasokan komoditas dari daerah penghasil utama, khususnya pada kelompok makanan dan minuman, serta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi faktor signifikan yang mendorong terjadinya deflasi di wilayah tersebut.
2. Deflasi terutama didorong oleh penurunan harga beberapa komoditas utama, seperti cabai merah, kentang, dan BBM nonsubsidi. Penurunan harga cabai merah disebabkan oleh meningkatnya pasokan, baik dari produsen lokal maupun dari luar daerah, harga kentang juga mengalami penurunan karena perbaikan pasokan dari luar provinsi, dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap deflasi.
3. Seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengalami deflasi pada September 2024. Kabupaten Pasaman Barat mencatat deflasi terdalam, mencapai -0,67 persen mtm, meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat -0,5 persen mtm. Kota Padang, sebagai ibu kota provinsi, mencatat deflasi sebesar -0,42 persen mtm, naik dari deflasi bulan Agustus sebesar -0,03 persen mtm.
4. Kota Bukittinggi juga mengalami penurunan inflasi dengan deflasi sebesar -0,28 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencatat -0,32 persen mtm. Kabupaten Dharmasraya mencatat deflasi sebesar -0,20 persen, sedikit membaik dari realisasi inflasi pada Agustus 2024 yang mencapai -0,57 persen mtm.
5. Inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengalami perbaikan. Kota Bukittinggi mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 1,21

persen ytd, diikuti Kota Padang dengan 0,37 persen ytd, Kabupaten Dharmasraya 0,01 persen ytd, dan Kabupaten Pasaman Barat yang mencatat deflasi sebesar -0,98 persen ytd.

6. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi juga terkendali dengan Kabupaten Dharmasraya mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 2,85 persen yoy, diikuti oleh Kota Bukittinggi dengan 1,70 persen yoy, Kabupaten Pasaman Barat 1,59 persen yoy, dan Kota Padang sebesar 1,28 persen yoy.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dinas Pangan melaksanakan Gerakan Pasar Murah (GPM) di RTH tanggal 13 Juli 2024.
2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan Pemantauan Harga Bapok setiap hari di Pasar- pasar.
3. Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah KAD antara Dinas PerdagKOP UKM dengan Pemkab Kampar.
4. Sosialisasi Manajemen Usaha untuk IKM oleh Dinas Inaker
5. Bimtek Pengolahan bahan Pangan asal Hewan oleh Ibu-Ibu PKK bersama Dinas Peternakan dan Keswan.
6. Capacity Building TPID Kabupaten dan TPID Provinsi Sumatera Barat ke Jawa Tengah
7. Identifikasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan berdasarkan PMK 43 Tahun 2024 untuk Insentif Fiskal Tahun Berjalan.
8. Pelaporan Triwulanan Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi ke Aplikasi Monev TPIN dan Laporan Mingguan ke Kejaksan.
9. Menjalin komunikasi efektif dengan peninjauan kerjasama antar daerah surplus dan minus komoditi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi agar tetap berada di sekitar target yang telah ditetapkan, yakni 2,5 1 persen yoy. "Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan inflasi tetap terkendali, khususnya di sektor pangan yang sangat mempengaruhi inflasi di Sumatera Barat," tambahnya.
2. Beberapa upaya yang terus dilakukan TPID di antaranya adalah penyelenggaraan operasi pasar di berbagai kabupaten/kota untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok, rapat koordinasi untuk sinkronisasi neraca pangan, serta monitoring dan evaluasi harga-harga di pasar. Selain itu, TPID juga aktif dalam distribusi beras ke masyarakat, capacity building, dan memperkuat komunikasi efektif terkait inflasi.
3. Diharapkan dapat semakin memperkuat pengendalian inflasi pangan yang efektif dan berkelanjutan, sehingga tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta TPID, upaya pengendalian inflasi di Sumatera Barat diharapkan dapat terus berjalan lancar dan sesuai target, sehingga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi provinsi ini dapat terjaga
5. Alokasi anggaran pengendalian inflasi daerah diarahkan untuk program dan kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga dan komunikasi yang efektif.
6. Perlunya ditingkatkan kapasitas anggota TPID untuk lebih memahami tugas dan fungsi TPID dalam upaya pengendalian inflasi Daerah.
7. Koordinasi yang lebih intensif dalam meningkatkan komunikasi efektif antar Kabupaten dan Kota serta Pemerintah Provinsi untuk optimalisasi pelaksanaan.
8. Review terhadap RAD Inflasi.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

5.

1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan dari TW I- TW IV.
3. Mengarahkan program kegiatan pada kegiatan :
 1. Pemantauan harga dan stok
 2. Rapat teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah
 3. Menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan barang dan bahan pokok
 4. Pencanaan gerakan menanam
 5. Operasi pasar murah
 6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor
 7. Meningkatkan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi